

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu kegiatan atau upaya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dikenal dengan istilah implementasi kebijakan. Untuk mewujudkan kebijakan publik secara utuh, implementasi kebijakan merupakan langkah yang krusial. Tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan dirancang, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai jika pelaksanaannya tidak dipikirkan dengan matang, sebagaimana dijelaskan oleh George Edward III (1980:1). Strategi implementasi kebijakan melibatkan upaya menyatukan berbagai lapisan masyarakat untuk mewujudkan perubahan, yang pada hakikatnya merupakan transformasi yang melibatkan beberapa organisasi (Mulyadi 2015:26). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan merupakan langkah yang tepat, karena hal ini meningkatkan kemungkinan terwujudnya hasil yang diinginkan masyarakat.

Sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu kebijakann yang menjadi salah satu perangkat lunak yang membantu dalam pengelolaan data kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah secara lengkap dan terpadu. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, “Sistem Manajemen Kepegawaian merupakan suatu kesatuan yang utuh dan terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan: 1) pengumpulan data, 2) pelaksanaan prosedur, 3) orang pengolah, 4) perangkat lunak; 2) perangkat penyimpanan, seperti

bank data dan pusat data, dan 3) perangkat komunikasi, yang semuanya saling bergantung dan saling menentukan satu sama lain dalam memberikan informasi tentang personel membuka posisi dengan kandidat yang memenuhi syarat sesegera mungkin, Sistem Informasi Manajemen Personalia (SIMPEG) membantu memperkirakan persyaratan pelatihan, pengembangan, perekrutan, dan seleksi apa yang mungkin timbul. Sebagai bonus tambahan, Sistem Informasi staf menyediakan pendekatan berbasis kebutuhan untuk manajemen kepegawaian, dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan administrasi secara profesional melalui komputersasi dan modernisasi data kepegawaian dalam bidang manajemen dan organisasi. Kepala

Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan berfungsi sebagai pembantu instansi pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan masalah pelatihan. Tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai antara lain adalah pengelolaan data pegawai dalam batas kota, serta pendampingan walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan kepegawaian. Badan Kepegawaian Kota Binjai selama ini menangani data pegawai secara manual, sehingga menyebabkan tidak efisiennya pelayanan akibat proses informasi yang lamban, melelahkan, membuang-buang waktu, dan tidak terorganisir. Akibatnya, layanan informasi karyawan berada di bawah standar dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan wawancara pertama dengan Pak TS, salah satu operator SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, BKD merupakan suatu instansi yang tugas pokoknya menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian. Sesuai Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa aplikasi e-Absensi dan e-Kinerja terintegrasi dengan SIMPEG (pasal 20 dan 21), hal ini juga menjadi landasan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai. (BKD) penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Tujuan penggunaan SIMPEG adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi proses pengelolaan data kepegawaian.

Terkait hal tersebut, implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai mengalami kendala. Hal ini antara lain infrastruktur yang belum memadai di beberapa OPD, serta rawannya kesalahan pada sistem SIMPEG yang pada akhirnya menyebabkan keterlambatan input data di beberapa OPD sehingga pada akhirnya memperlambat proses presentasi. aplikasi SIMPEG membutuhkan waktu terlalu lama untuk memproses data.

Berdasarkan fenomena yang dipaparkan di atas maka penulis ingin meneliti dengan judul **“Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai?
2. Apa Saja Penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk mempermudah penelitian dengan menjadikan penelitian ini lebih tepat sasaran. Berikut focus penelitian:

1. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai. Kanjian ini meliputi Proses manajemen data kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai.
2. Penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai. Kanjian ini meliputi Komunikasi, Sumber Daya dan Disposisi.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini mencakup aspek teoritis dan praktis, yang dituangkan dalam fokus penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam pemahaman kita tentang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan implementasinya,

serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian teori ilmu pengetahuan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) khususnya pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai dengan memperbanyak referensi dan memberikan masukan kepada pihak atau instansi yang berkepentingan